

Tajuk

## Mengapresiasi Tiga Tuntutan Kaum Buruh

**PUBLIK** mengapresiasi tuntutan yang disampaikan kaum buruh dalam memperingati Hari Buruh yang populer dengan sebutan May Day. Terutama tuntutan buruh agar pemerintah menurunkan harga beras, listrik, dan BBM, serta membangun kedaulatan pangan dan energi.

Tuntutan kedua, menolak upah murah serta meminta pemerintah mencabut PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Para buruh juga menyatakan menolak tenaga kerja buruh kasar asal China dan mencabut Peperes No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Yang ketiga, hapus outsourcing dan pilih presiden pro buruh.

Tuntutan menurunkan harga beras, listrik, dan BBM, serta membangun kedaulatan pangan dan energi, sangat pas dengan apa yang dirasakan sebagian besar rakyat saat ini. Mereka merasa harga listrik, BBM dan beras sangat mahal. Padahal, disisi lain, daya beli mereka semakin melemah.

Demikian pula tuntutan agar pemerintah membangun kedaulatan pangan dan energi sangat tepat karena kedaulatan pangan kita tidak lagi perlu impor beras, garam, cabai, tepung terigu, dan lainnya. Dampaknya, tentu saja mensejahterakan petani dan harga pangan menjadi murah karena produk lokal lebih murah dibanding produk impor.

Perayaan Hari Buruh masih diwarnai keprihatinan besar terkait dengan kondisi hubungan industrial yang belum sepenuhnya kondusif dan masih banyaknya kasus kekerasan yang mencederai rasa kemanusiaan pada buruh kita di dalam dan luar negeri.

Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan kaum buruh sebuah kewajiban, patut diberikan acungan jempol. Maka, wajib hukumnya bagi pemerintah dan kalangan pengusaha untuk memenuhi tuntutan kaum buruh. Dengan demikian tujuan kita untuk meningkatkan taraf hidup layak bagi kaum buruh bisa terpenuhi. Dengan demikian mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mari kita jadikan Hari Buruh sebagai momentum untuk mengakhiri kemelut perburuhan yang menghalangi kita maju. Tuntutan buruh yang belum banyak beranjak dari sebelumnya, haruslah segera dipenuhi. Kalangan dunia usaha jangan lagi memosisikan buruh sebagai musuh terbesar karena aksi-aksi mereka selama ini. Dunia usaha harus mengagap buruh sebagai elemen penting dalam kemajuan perusahaan.

Presiden Joko Widodo sudah mengusung Nawacita. Lewat Nawacita kalangan buruh berharap kehidupan mereka mendatang lebih cerah dan sejahtera. Pasalnya, dalam Nawacita tersebut, negara akan mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan program aksi yang akan membangun dan pendidikan buruh.

Dengan Nawacita pula negara berjanji akan hadir dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, sehingga jika terjadi ketidakadilan bagi buruh tentu negara tak akan absen untuk menghapuskan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang diderita buruh.

Harapan kita tingkat kesejahteraan buruh semakin membaik. Kita berharap kepada pemerintahan Jokowi-JK melakukan terobosan-terobosan untuk memecahkan kebuntuan permasalahan perburuhan, seperti soal pengupahan, jaminan kepastian kerja, dan jaminan sosial.

Kita mengharapkan kepada kalangan pengusaha untuk menjadikan buruh sebagai partner.

Jangan pandang tenaga kerja dalam arti fisik. Pandanglah mereka sebagai bagian dari program pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Jika ini dilakukan maka hubungan antara pengusaha (pemodal) dan pekerja berlangsung harmonis.

Tentu saja tuntutan buruh untuk menaikkan upah dan kesejahteraan itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas, kapabilitas, dan integritas.

Mari mensejahterakan buruh sebagaimana buruh selama ini telah mensejahterakan pengusaha. Ingat, tanpa tenaga kerja, kita semua tak bisa apa-apa. Tanpa mereka pengusaha/pemilik modal tidak akan meraih keuntungan. Maka sudah tugas kita semua untuk mengangkat derajat buruh yang selama ini telah menjadi pahlawan bagi keluarganya, perusahaan dan negeri ini.

Selamat Hari Buruh, semoga kaum buruh semakin sejahtera. (\*\*\*)

### CITIZEN JOURNALISM



Oleh Dr. H. Dadang Solihin, S.E., M.A.

# PENDIDIKAN NASIONAL DAN PENGUATAN BUDAYA BANGSA

"PENDIDIKAN dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir."

Sepenggal kalimat dari Ki Hadjar Dewantara itu rasanya perlu digaungkan kembali untuk memaknai momentum Hari Pendidikan Nasional yang selalu diperingati setiap 2 Mei. Ki Hadjar adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, sekaligus juga Bapak Pendidikan Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959. Melalui kepres tersebut, hari kelahiran beliau pada 2 Mei 1889 selanjutnya dikukuhkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Lantas, apa urgensi dan yang membuatnya berbeda dari setiap kali Hari Pendidikan Nasional itu dirayakan dari tahun ke tahun? Untuk tahun ini, kiranya kita semua perlu merefleksikan satu kata kunci dari pernyataan Ki Hadjar di atas, yakni kebudayaan! Mengutip defenisi yang diberikan oleh Koentjaraningrat, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata Budhaya yang merupakan bentuk dari kata budhi yang berarti akal. Jadi, kebudayaan itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.

Dari defenisi tersebut maka terlihat sangat jelas adanya korelasi antara kebudayaan dan pendidikan.

Secara sederhana, tesis yang bisa dimunculkan adalah ketika pendidikan itu diperkuat maka harusnya kebudayaan itu akan semakin baik. Lalu pertanyaan pun muncul kembali, bagaimana dengan pendidikan -- khususnya pendidikan tinggi di Indonesia -- di era teknologi digital seperti sekarang?

Tentunya, tantangan pendidikan yang dihadapi pada masa sekarang sudah berbeda jauh dengan era Ki Hadjar Dewantara. Pada masa lalu, teknologi masih belum menjadi pegangan hidup (way of life). Pada masa ini, di saat dunia global sudah memasuki era digital, teknologi tak hanya menjadi way of life namun sudah menjadi lifestyle. Tantangan pun menjadi semakin berat karena perkembangan teknologi digital dengan kemampuan artificial intelligence (AI) -- yang di dalamnya mengubah data menjadi informasi -- akan membuat semua orang bisa secara mudah dan murah untuk memperoleh kebutuhan informasi.

Inilah yang harusnya disikapi oleh pelaku pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Melangkah tanpa melakukan akselerasi dengan kemajuan teknologi yang sudah berkembang pesat, rasanya menjadi sangat naif. Namun sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Microsoft, Bill Gates, teknologi itu sesungguhnya hanyalah alat. Untuk menjadikan anak-anak bangsa bisa saling bekerjasama

dan termotivasi, peran paling utamanya adalah seorang guru.

Bill Gates mafhum benar bahwa guru merupakan pondasi bagi proses mengalirnya perkembangan teknologi dan perubahan di masa mendatang. Untuk itulah, kemampuan para guru dan dosen ini perlu mendapat perhatian besar. Sayangnya, porsi tenaga pengajar di Indonesia masih terbilang rendah.

Menteri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Muhammad Nasir pernah menjelaskan perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswa di perguruan tinggi swasta itu adalah satu banding 30 (1:30) untuk mata kuliah eksakta dan satu banding 45 (1:45) untuk sosial. Sementara itu, untuk perguruan tinggi negeri perbandingan dosen dengan mahasiswanya adalah 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial.

Parameter lain yang bisa dirujuk untuk melihat masih minimnya tenaga pengajar dosen yang masih rendah di negeri ini adalah para penyandang gelar doktor (S3). Di Indonesia, dari setiap satu juta penduduk hanya terdapat 143 doktor. Sementara, Malaysia memiliki rasio dari setiap satu juta penduduk terdapat 509 doktor. Selanjutnya di India, terdapat 1.410 doktor dalam setiap satu juta penduduknya.

Inilah tantangan nyata yang dihadapi oleh dunia pendidikan

tinggi di Indonesia. Selain belum tercapainya kondisi ideal antara dosen dan mahasiswa, Indonesia menghadapi pula tantangan perubahan dalam proses pengajaran. Ke depannya, perguruan tinggi harus mulai menerapkan sistem pengajaran hybrid. Dalam hal ini, pengelola pendidikan tinggi di Indonesia sudah seharusnya memikirkan penerapan teknologi pembelajaran atau perkuliahan secara daring yang kini dikenal sebagai Massive Open Online Courses (MOOCs).

Untuk mendorong model semacam itu, perlu pula dipikirkan pembentukan lembaga penjamin mutu terhadap perkuliahan daring. Lembaga ini dapat dibentuk antarperguruan tinggi atau dapat pula oleh pemerintah, yang bertugas memberi jaminan pada pasar kerja mengenai kemampuan lulusan untuk memenuhi keperluan lapangan kerja. Sertifikasi semacam ini diperlukan antara lain bila seorang mahasiswa sebagian besar beban akademiknya diambil dari berbagai sumber. Hingga kini, Indonesia masih terlihat gagap.

Di tengah kegagalan itu, kita juga dihadapi tantangan kepada para peserta didik kita, dalam hal ini mahasiswa. Para mahasiswa tentunya harus bisa responsif puladalam menjawab semua perubahan ini secara positif. Artinya, perubahan tantangan zaman ini harus bisa dilakukan

secara selaras dengan seluruh-takeholder di dunia pendidikan. Mahasiswa sebagaimana cikal bakal pemimpin bangsa, sudah sepatutnya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk membekali dirinya dengan pengetahuan tanpa mengabaikan kebudayaan bangsa yang berlandaskan pada Pancasila.

Inilah semangat yang harusnya dimunculkan kembali di saat negeri ini merayakan momentum Hari Pendidikan Nasional. Kita boleh saja menjadi pintar secara akal tapi kita tidak boleh melupakan nilai-nilai agung bangsa ini sebagaimana yang sudah terkandung di dalam Pancasila. Jika bangsa ini ingin maju seperti Cina, Jepang dan negara-negara Eropa lainnya, maka perkuatlah dengan ilmu pengetahuan. Tapi jika kita ingin menjadi bangsa besar di dunia maka jangan pernah tinggalkan Pancasila sambil terus memperkuat ilmu pengetahuan modern.

Tentunya, Pancasila yang dipahami itu tidak digunakan sebagai alat dagang kampanye politik praktis yang bersifat sloganistik saja. Tapi, bagaimana mengamalkan Pancasila yang sesungguhnya ke dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting untuk dijawab. Jadi, selamat hari pendidikan! Saya Pancasila dan saya siap untuk belajar!

■ Penulis adalah Rektor Universitas Darma Persada



ILUSTRASI



Oleh Muhammad E. Irmansyah

**SRI MULYANI INDRAWATI (SMI)**, menteri keuangan yang terlanjur di beri label menteri keuangan terbaik dunia itu beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa pelemahan rupiah akan memperkuat daya saing.

Menurut saya statemen seperti itu hanyalah statemen seorang dosen kepada mahasiswanya. Itupun statemen monolog tanpa ada dialog di ruang kelas kuliah mata pelajaran yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Nampaknya Menteri Keuangan "terbaik" ini perlu banyak dialog dengan para ekonom lainnya. Jangan mengunci diri duduk diatas menara gading. Pelemahan rupiah memperkuat

## SMI, MENGGANTANG ASAP?

daya saing ekspor harus disertai dengan beberapa syarat. Harus dilihat juga komposisi ekspor dan impor dan kecenderungannya. Pertanyaannya, apakah sebaiknya rupiah melawan USD untuk menguat? Atau mengikuti arus melemah?

Trend pelemahan nilai tukar tidak hanya semata-mata karena membaiknya data perekonomian AS saja yang kemudian mengakibatkan investor pindahkan asetnya ke USD. Tekanan terhadap rupiah akibat pelepasan defisit fiskal AS, reformasi perpajakan AS yang mengakibatkan ekspektasi kenaikan suku bunga THE FED dan lain-lain, tetapi juga karena tidak adanya inovasi dalam kebijakan tepat guna ekonomi yang disesuaikan dengan situasi medan lapangan hari ini.

Memang banyak negara yang sengaja lemahkan DOLLAR nya dengan maksud tertentu. Contohnya: Jepang, pelemahan nilai tukar "by design" ini merupakan dampak dari pertumbuhan ekonomi Jepang yang terus melambat sebagai akibat konsumsi domestik yang rendah. Jepang kemudian andalkan ekspor sebagai basis pertumbuhan ekonomi mereka walaupun

ini bersifat temporer. Dengan melemahnya nilai tukar diharapkan barang "MADE IN JAPAN" akan jadi lebih kompetitif dan akan memberikan pendapatan lebih bagi eksportir sehingga pertumbuhan ekonomi yang berasal dari ekspor diharapkan dapat terlaksana sesuai rencana.

Karakteristik ini sepiantas lalu nampaknya cocok dengan Indonesia yang memiliki tujuan untuk turunkan IMPOR. Masyarakat Indonesia yg berada pada kategori "middle income", memiliki kecenderungan yang tinggi untuk konsumsi. Kemudian konsumsi ini ternyata sampai saat ini masih dipenuhi dengan barang impor yang tidak diimbangi dengan perbaikan ekspor. Untuk kurang tingginya impor agaknya pelemahan nilai tukar akan membuat harga barang impor menjadi mahal. Cara lain, pemerintah terapkan aturan terkait pembatasan impor, tapi hal ini timbulkan kelangkaan barang dan sebabkan instabilitas harga barang dan akhirnya pengaruh inflasi dan perekonomian Indonesia. Tugas pemerintah adalah harus dapat mensubstitusi ba-

rang-barang yang di konsumsi masyarakat dari impor tadi melalui SUPPLY dari dalam negeri. Masalah yang utama saat ini adalah, banyak "raw material" untuk ekspor tadi justru harus di impor. Padahal 60% bahan baku kita masih diimpor, tentu kita harus cari penggantinya, ada 3 produk bahan baku yang paling tinggi yakni suku cadang otomotif, baja dan baja terapan dan petrokimia.

Sebagai contoh dalam industri otomotif, komponen impor lebih banyak dari komponen lokal. Satu lagi contoh dalam industri tekstil, kapas 100% harus impor karena syarat untuk tekstil kualitas tertentu, karena hanya bisa untuk produk tertentu dengan kualitas rendah rendah saja.

Industri benang Polyester sebagai bahan lain dari tekstil juga impor, dan sudah lama kalah dari Cina. Semua mesin industri tekstil impor, kita tidak pernah mampu memproduksi mesin industri sendiri. Sementara industri tekstil Indonesia saat ini hanyalah sebagai tukang saja (upah saja), walaupun membutuhkan tenaga kerja banyak (labor intensive). Jadi

sama sekali tidak benar jika SMI beranggapan bahwa pelemahan mata uang rupiah akan memperkuat posisi ekspor.

Artinya, opsi pelemahan rupiah ini untuk sementara waktu hanya tinggal angan-angan, mungkin nanti. Tapi bukan untuk saat ini!

Pelemahan RUPIAH saat ini menurut saya, merugikan. Karena jika saat ini pemerintah lakukan intervensi dengan menggunakan cadangan, maka akhirnya sia-sia.

Hal yang penting lagi adalah bahwa berbeda antara strategi pelemahan rupiah dengan pelemahan rupiah akibat TEKANAN (atau todongan) dan sebagai akibat salah mengambil kebijakan. Yang disalahkan koq orang luar? Buruk muka, cermin dibelah.

Nampaknya pemerintah khususnya Menteri Keuangan sudah mulai panik karena mulai tidak fokus terhadap prioritas WHAT TO DO! Padahal banyak sekali tindakan inovatif dan kreatif yang bisa dia lakukan, ketimbang mengelabui rakyat bahwa pelemahan rupiah dapat meningkatkan ekspor.

■ Penulis adalah ISDT-Institute for Studies and Development of Thought